



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



**SEKRETARIAT DPRD
KAB. KEP SELAYAR**

Jl. Jend Ahmad Yani No. 1, Benteng

Telp. (0414) 21714 No. Faks. (0414) 21097

Kab. Kepulauan Selayar 92812

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat terselesaikan. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2024 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar baik yang telah berhasil mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja maupun yang belum mencapai target.

Kami berharap Laporan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Sekretaris DPRD
Kabupaten Kepulauan Selayar

Drs. AHMAD YANI
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196703121992031004

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Gambaran Umum Sekretariat DPRD	2
D. Isu-Isu Strategis	7
BAB II	9
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Indikator Kinerja Utama.....	14
C. Rencana Kinerja Tahunan	15
BAB III.....	28
AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
A. Pengukuran Kinerja.....	28
B. Analisis Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	31
C. Realisasi Keuangan	55
BAB IV	59
PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Jabatan.....	5
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan Sekretariat DPRD 2021-2026.....	13
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	13
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Perubahan Sekretariat DPRD.....	14
Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan Setelah Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.....	16
Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan Setelah Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.....	17
Tabel 2.6 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	25
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Sebelum Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.	26
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Setelah Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.	26
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	31
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2024 Per Triwulan	32
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Tahun Sebelumnya dan Periode Akhir Renstra	34
Tabel 3.4 Target dan Realisasi kinerja sasaran 1 tahun 2024	34
Tabel 3.5 Realisasi dan Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Pendukung Sasaran 1.....	35

Tabel 3.6 Target dan Realisasi kinerja sasaran 2 tahun 2024	40
Tabel 3.7 Penyelesaian / Pengintegrasian Program Kerja DPRD	
Ke dalam Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD TA 2024	40
Tabel 3.8 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 indikator 1	45
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 indikator 1 Per bulan.....	49
Tabel 3.10 Jumlah Produk Hukum DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar	
Tahun 2019-2024	48
Tabel 3.11 Capaian Realisasi Anggaran TA 2024 Menurut Program,	
dan Sub Kegiatan Tahun 2024	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	3
Gambar 2.1 Cascading Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai upaya pencegahan terhadap bias-bias penyalahgunaan kewenangan pada otonomi daerah, pemberian kewenangan harus dijalankan dengan peningkatan akuntabilitas. Selain itu, sesuai dengan amanat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pemerintahan perlu untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate dan akuntabel,

Untuk mewujudkan adanya pertanggungjawaban dan peningkatan akuntabilitas kinerja, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi (*good governance*) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lakip dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam program/kegiatan yang telah direncanakan pada suatu Tahun Anggaran.

Penyusunan LAKIP diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tata cara Review atas Lakip Instansi. Sesuai dengan penjelasan kebutuhan akan pertanggungjawaban akuntabilitas dan amanat dari peraturan di atas maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun Lakip sebagai transparansi informasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis

perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa tujuan pelaporan kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Maksud dari penyusunan LAKIP ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Selayar secara manajerial kepada Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder (DPRD dan masyarakat),

Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah :

1. Memberikan informasi mengenai kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Merupakan media evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang;
3. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang dan merupakan media dalam upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

C. Gambaran Umum Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan dalam hal administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Berdasarkan Rencana Srategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 – 2026, Sekretariat DPRD sesuai perda No. 4 tahun 2020, dan peraturan bupati nomor 23 tahun 2024 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretriat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , mempunyai tugas dan fungsi “*Sebagai Unsur Pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.*”

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD dibantu oleh

pejabat struktural eselon III, yaitu Kepala Bagian, dan eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian, dan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang membawahi tiga bagian, yakni:

- a. Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :
 - Sub. Bagian Program dan Keuangan;
 - Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum.
- b. Bagian Pengawasan dan Penganggaran terdiri dari :
Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :
Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar Tahun 2024

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, "Sektetariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan

fungsi DPRD". Dalam menyelenggarakan tugas Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

a. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan serta pemberian dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi:

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Sekretariat DPRD dan administrasi kesekretariatan DPRD;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan Sekretariat DPRD dan administrasi keuangan DPRD;
- Penyelenggaraan dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD di bidang legislasi;
- Penyelenggaraan dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD di bidang Penganggaran dan pengawasan; dan
- Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan Fungsinya.

b. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Bagian umum dan keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam mengkoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD. Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :

- Sub bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Keuangan dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD;
- Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan,

hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset, pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan.

c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan Fungsi dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD di bidang Pembentukan Peraturan Daerah.

d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan Fungsi dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD di bidang penganggaran dan pengawasan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelomok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Komposisi Sumber Daya Aparatur

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar **per 31 Desember 2024** didukung oleh sumber daya aparatur ASN sebanyak 26 (dua puluh enam orang). Berikut kualifikasi jabatan Pegawai lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Jabatan

No	Jabatan	Formasi	Pegawai Yang Ada	Kekurangan
A	Jabatan Struktural			
1.	Sekretaris DPRD	1	1	0
2.	Kabag Umum dan Keuangan	1	1	0
3.	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1	1	0
4.	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1	1	0
5.	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Hukum	1	1	0
6.	Kasubbag Program dan Keuangan	1	1	0
B	Jabatan Fungsional Tertentu			
1.	Perisalah Legislatif Ahli Muda	3	3	0
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	3	1	2

C.	Jabatan Pelaksana			
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	12	6	6
2.	Pengadministrasi Perkantoran	6	6	0
3.	Penata Layanan Operasional	4	4	0
Jumlah		34	26	8

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar Tahun 2025

Sumber Daya Aparatur adalah salah-satu faktor yang menunjang kinerja suatu instansi. Dari Tabel 1.1. di atas dapat dilihat bahwa dari 34 formasi yang dibutuhkan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang terpenuhi hanya 26 Pegawai, masih terdapat 8 kekurangan pegawai dengan spesifikasi jabatan yang berbeda-beda. Adanya kekurangan sumber daya pada Sekretariat DPRD mengakibatkan *job desk* dari suatu jabatan dikerjakan oleh pihak yang bukan pada bidangnya sehingga selain beban kerja yang tumpang tindih, kualitas dari *output* yang dihasilkan juga masih rendah. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja adalah dengan memenuhi formasi yang dibutuhkan oleh Sekretariat DPRD.

4. Keadaan Sarana dan Prasarana

a. Bangunan Gedung

Sekretariat DPRD berlokasi di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Gedung Sekretariat DPRD dengan luas bangunan ±940 m², terdiri dari 5 gedung yakni:

1. Tiga gedung operasional kantor yang terdiri dari 1 gedung tempat Ibadah, dan 1 gedung Rumah Jabatan Ketua DPRD Kab.Kep. Selayar. Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - Gedung A terdiri dari 2 lantai;
 - Gedung B terdiri dari 3 lantai;
 - Gedung C terdiri dari dua lantai.
2. Satu gedung tempat ibadah. Keadaan gedung tempat ibadah Sekretariat DPRD atau musholla saat ini mengalami kerusakan pada bagian atap, hal ini disebabkan selain dari pada gedung yang telah ada sejak lama, juga disebabkan oleh faktor cuaca yang mempengaruhi kerusakan dari atap bangunan mushola.
3. Satu gedung Rumah Jabatan Ketua DPRD Kab.Kep. Selayar.

b. Sarana Transportasi, Informasi dan Komunikasi

a. Sarana Transportasi

Kendaraan bermotor operasional di Sekretariat DPRD per 31 Desember 2024 terdiri atas Kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat, serta kendaraan roda empat jabatan bagi pimpinan DPRD :

Kendaraan roda empat Pimpinan DPRD	: 3 unit
Kendaraan roda empat Sekretariat DPRD	: 2 unit
Kendaraan roda 2	: 34 unit

b. Sarana Pendukung Lainnya

Sarana pendukung lainnya yang tersedia antara lain Wifi/Jaringan Internet, Laptop, komputer, Printer, LCD, Sound, AC , Kulkas dan sarana pendukung lainnya yang menunjang kinerja dari Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD.

Sarana dan Prasarana pada Sekretariat secara umum telah mencukupi namun masih perlu untuk ditingkatkan dalam hal pemeliharaan kualitas ataupun beberapa sarana yang sudah mencapai masa penggantian, dipandang perlu untuk segera diganti dengan yang baru untuk meningkatkan daya dukung bagi fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD

D. Isu-Isu Strategis

Sekretariat DPRD memiliki dua tanggung jawab yakni secara administratif dan operasional. Secara administratif Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dan secara operasional Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD. Sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD perlu untuk menyeimbangkan kedua tanggung jawab tersebut dengan berbagai faktor eksternal dan internal yang berada di lingkungan Sekretariat DPRD. Sebagai lembaga birokrasi, Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan kepada DPRD dituntut untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan harus memiliki mentalitas kuat dan kemampuan untuk mengakomodir kepentingan dalam mendukung kinerja DPRD.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut kemudian dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Sehingga diperlukan kemampuan untuk mengenali serta merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat.

Isu-isu Strategis ditetapkan melalui analisa lingkungan kerja berupa faktor eksternal dan internal untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya yang dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Adapun yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, meliputi:

- Keterbatasan Sumber Daya Aparatur dalam hal kuantitas dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD;
- Dinamika politik mempengaruhi kinerja sehingga menuntut mentalitas yang kuat dalam mengakomodir berbagai kepentingan semua pihak;
- Kualitas dari Sumber Daya Aparatur masih rendah dalam hal kesadaran akan tanggung jawab dan disiplin kerja, terdapat beberapa aparat yang masih lalai terhadap tanggung jawabnya dan memberikan beban kerja kepada pihak lain;
- Keterbatasan anggaran dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana dengan kualitas yang baik dan maksimal.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, Rencana Strategis Sekretariat DPRD dirumuskan dan ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dari perencanaan sebelumnya dan melakukan pembaharuan/perubahan apabila terdapat hal yang perlu untuk diperbaharui mengikuti ketentuan dan peraturan terbaru.

Pada Tahun 2021 telah ditetapkan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, kemudian dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah menjadi dasar dilaksanakannya koordinasi, konsultasi dan asistensi dalam melakukan perubahan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dari hasil konsultasi terkait Perubahan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Adapun yang termuat dalam Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah adalah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang merupakan landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD dan demi mendapatkan perencanaan yang baik, dapat dikelola, selaras dengan manajemen pemerintah daerah, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah.

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan yang potensial dihadapi pada periode 2021 - 2026, dengan mengacu kepada RPJMN 2020-2024 , Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Mandiri, RPJMD 2016-2021, Revisi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023 , dan RPJPD Kab Kepulauan Selayar 2005 – 2025 adalah Selayar sebagai Kabupaten Maritim Terdepan, Mapan, mandiri dan berkelanjutan maka Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah :

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”.

Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki Kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar muat barang, serta perdagangan industri. Indikator yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD dengan Visi Bandar maritim adalah:

1. Kepulauan Selayar sebagai simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan Sumber Daya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar sebagai penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia ekspor perikanan dan non perikanan;
4. Peningkatan pelayanan , pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Bandar maritim didukung:

- 1) Kawasan Distribusi Logistik;
- 2) Kawasan Ekonomi Khusus;
- 3) Kawasan Industri Perikanan Terpadu.

Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021–2026:

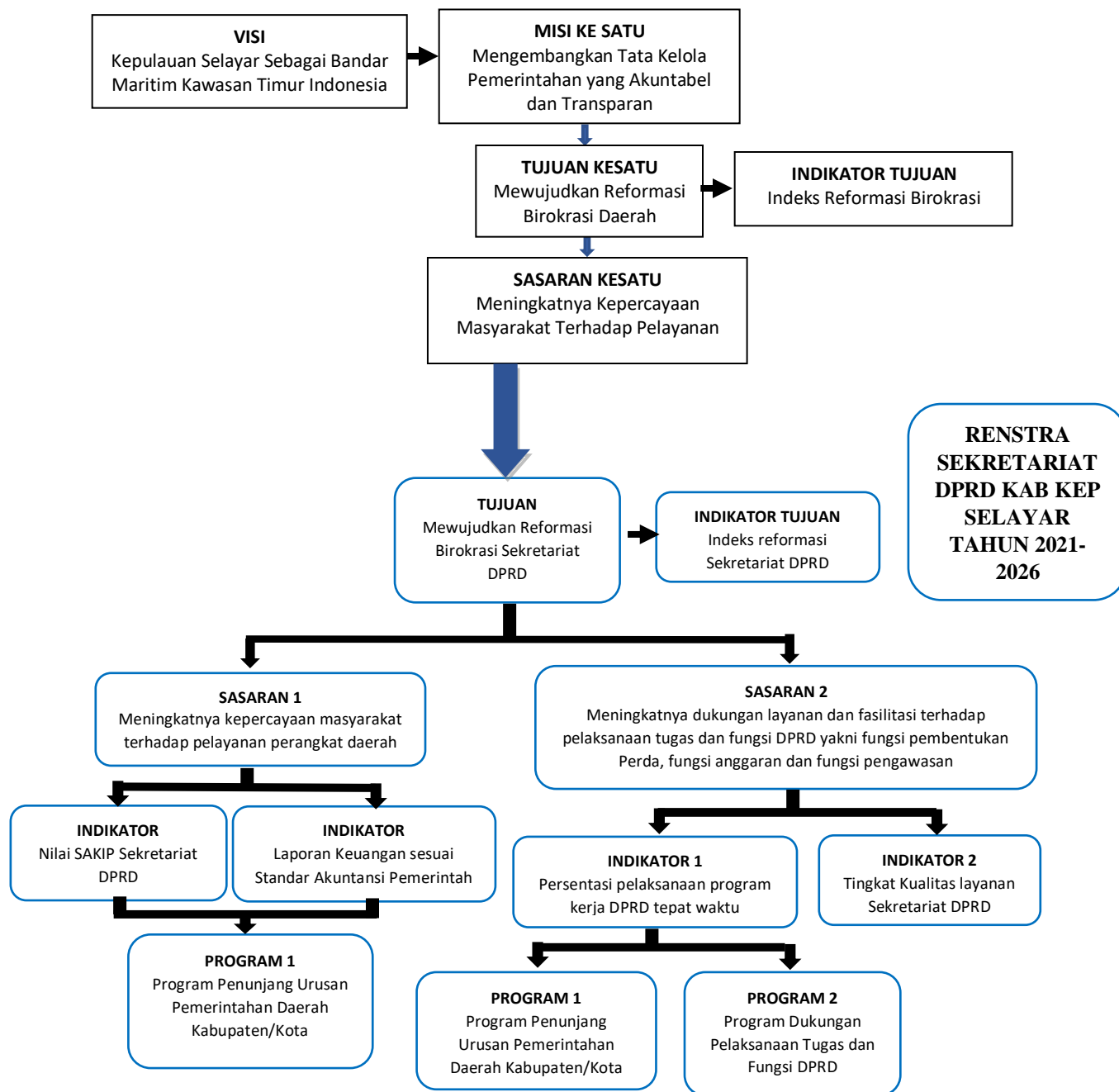
- 1) Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan;
- 2) Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pedesaan;
- 3) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat;
- 4) Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan (Kemaritiman);
- 5) Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan;
- 6) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berangkat dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 serta berdasarkan tugas pokok fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Renstra mendukung pencapaian Misi Kepala Daerah yaitu pada misi Ke-1 : “Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan”.

Berikut cascading Sekretariat DPRD :

Gambar 2.1

**Cascading Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar
RPJMD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021-2026**



2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Cascading Kinerja, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar mendukung Tujuan Kesatu (T1), Sasaran kesatu (S1) dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Adapun Tujuan dan Sasaran pada Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar 5 (lima) tahun ke depan adalah :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan /Indikator Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD		Indeks reformasi Sekretariat DPRD	33,89 (C)	55,00 (CC)	64,00 (CC)	68,00 (B)	73,00 (B)	76,00 (A)
	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD		B(60)	B(65)	BB(70)	BB(75)	(A)80
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah		Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan	Persentasi pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu		100	100	100	100	100
		Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD		65	70	75	80	85

Sumber : Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar 2021-2026

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan perangkat daerah. Strategi dimaksud dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dan kegiatan.

Tabel 2.2

Strategi dan Arah Kebijakan

SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM yang ditunjang perangkat teknologi informasi	1. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur 2. Peningkatan sarana prasarana 3. Peningkatan kualitas SDM
	Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil	

	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku	
Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan	Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dukungan fasilitasi administrasi keuangan, persidangan, dan penyediaan tenaga ahli 2. Peningkatan system/digitalisasi program kegiatan

Sumber : Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar Tahun 2021-2026

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD berdasarkan hasil Renstra Perubahan pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Perubahan Sekretariat DPRD

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				ALASAN FORMULASI/RUMUS HITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Skala Nilai	Hasil Penilaian Inspektorat	Inspektorat
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Skala Nilai	Hasil Penilaian Inspektorat	Inspektorat
2.	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentasi pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	%	Jumlah program kerja yang di rencanakan dan jumlah yang terealisasi tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar

	yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan	Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD	Skala Nilai	Survei oleh Anggota DPRD Kab. Kep Selayar	Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar
--	---	---	-------------	---	------------------------------------

Sumber : Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar Tahun 2021-2026

C. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran dan membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah. Target kinerja sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan menjadi pertimbangan dan penentu pada saat pengalokasian anggaran. Indikator Kinerja ditentukan dengan berorientasi pada *output* dan *outcome* yang dihasilkan sehingga pada target kinerja dapat diperoleh ukuran keberhasilan dari suatu program, kegiatan ataupun sub kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) T.A, 2024 tercantum sebagai berikut :

Tabel 2.4

Rencana Kinerja Tahunan tahun 2025

Berdasarkan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB(75)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya capaian kinerja Sekretariat DPRD	Persentase capaian Kinerja Sekretariat DPRD	100%
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Sesuai		Meningkatnya capaian pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD	Persentase capaian kinerja pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD	100%
					Meningkatnya Dukungan Pelayanan Administrasi dan Fasilitasi terhadap Tugas DPRD	Persentase capaian Dukungan Pelayanan Administrasi	100%

3	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	100	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas dukungan pelayanan terhadap peningkatan kapasitas DPRD dan fungsi pembentukan perda DPRD	Rata rata Persentase keterpenuhan atas layanan pelaksanaan tugas Anggota DPRD dalam hal pembentukan Perda dan peningkatan kapasitas Lembaga DPRD	100%
		Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD	80		Meningkatnya Kualitas dukungan pelayanan pelaksanaan tugas fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD	Rata rata Persentase keterpenuhan atas layanan pelaksanaan tugas Anggota DPRD dalam fungsi anggaran dan pengawasan	100%

Sumber : Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahunan TA 2025

NO	Tujuan	Indikator	Sasaran			Program				Kegiatan/ Sub Kegiatan			
			Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Uraian	Indikator Kinerja (Intermedite Outcome/ output)	Capaian Kinerja	Anggaran
								Target	Target			Target	Target
1						6	7	8		10	11	12	13
1	Mewujudkan reformasi birokrasi Sekretariat DPRD	Indeks reformasi sekretariat DPRD	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB (75)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Kinerja Sekretariat DPRD Persentase capaian kinerja keuangan Sekretariat DPRD	100% 100%	17.765.533.700	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	100%	112.735.500
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5	56.620.600
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	7.480.000
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	7.574.900
										Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	4.030.000

		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Sesuai	sesuai
--	--	--	--------	--------

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	4.030.000
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	17.076.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	15.000.000
Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan	100%	2.550.638.400
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan	26/bulan	2.468.351.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pegujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	24.600.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	18.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	7.611.400
Pegelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	17.076.000

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	253.380.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	473.223.000
Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang pemerintah daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	739.551.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	196.470.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	97.862.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	20.000.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	425.219.000
Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	12.377.342.650
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 orang/bulan	11.501.533.700
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	125	372.913.000
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25	502.895.950

										Layanan Administrasi DPRD	Persentase Keterpenuhihan Layanan Administrasi DPRD	100%	921.569.400
										Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	12	10.020.500
										Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	2	5.036.000
										Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8	18.512.900
										Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12	888.000.000
2			Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan	Tingkat Persentasi pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD	100% 80	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Program Kerja DPRD Tersusun dan Terintegrasi Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan dokumen penganggaran setwan	100%	12.783.955.100	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Layanan dalam Pembahasan Perda (%)	100%	3.127.253.000
										Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5	305.000.000
										Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12	2.822.253.000
										Pembahasan kebijakan anggaran	Persentase Rapat Pembahasan yang terselenggara terhadap rapat yang terjadwal	100%	692.862.300
										Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	3	25.000.300

Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	3	24.996.800
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	3	214.288.000
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	3	214.288.600
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	3	214.288.600
Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	Rata-Rata Persentase Rapat dan Kunjungan Kerja yang terselesaikan terhadap rapat yang terjadwal	100%	4.695.840.000
Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	10	1.493.780.000
Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	10	1.418.894.700
Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	10	1.306.930.000
Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	10	148.638.500
Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	10	164.177.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	10	148.638.600

Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2	2.680.400
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5	12.100.800
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas lembaga DPRD	100%	2.698.497.000
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Bimtek DPRD	25	1.517.626.000
Penyediaan kelompok pakar dan Ti Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	60	30.000.400
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	21	180.000.000,00
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	50	820.005.000
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	60	255.000.000
Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Cakupan Layanan dalam penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (%)	100%	2.455.908.900
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	75	295.908.900
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75	2.160.000.000
Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Cakupan Layanan dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	100%	66.246.500
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5	66.246.500

										Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Terhadap Tugas DPRD	100%	939.170.300
										Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	22	326.434.000
										Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10	222.695.800
										Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	50	390.040.500

Tabel 2. 6
Rencana Kinerja Perubahan Tahunan TA 2025

NO	Tujuan	Indikator	Sasaran			Program				Kegiatan/ Sub Kegiatan			
			Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Uraian	Indikator Kinerja (Intermedite Outcome/output)	Capaian Kinerja	Anggaran
1						6	7	8		10	11	12	13
1	Mewujudkan refermasi birokrasi Sekretariat DPRD	Indeks reformasi secretariat DPRD	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB (75)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Kinerja Sekretariat DPRD	100%	17.765.533.700	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	100%	144.395.100
							Persentase capaian kinerja keuangan Sekretariat DPRD	100%		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5	91.280.200
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	7.480.000
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5.574.900

										Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8	18.512.900
										Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12	888.000.000
2			Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan	Persentasi pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD	100% 80	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Program Kerja DPRD Tersusun dan Terintegrasi Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan dokumen penganggaran setwan	100%	12.783.955.100	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Layanan dalam Pembahasan Perda (%)	100%	1.852.902.200
										Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5	22.661.000
										Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12	1.830.241.200
										Pembahasan kebijakan anggaran	Persentase Rapat Pembahasan yang terselenggara terhadap rapat yang terjadwal	100%	689.680.200
										Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	3	23.005.300
										Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	3	17.995.000

Adapun yang menjadi struktur program dan kegiatan yang berkaitan dan menjadi pendukung tercapainya target Kinerja Sekretariat DPRD Kab Kep Selayar Tahun 2025 sebagaimana berikut :

Tabel 2.7
Struktur Program dan Kegiatan
Tahun 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.765.533.700
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.395.100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	91.280.200
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	7.480.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	5.574.900
Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	4.030.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	4.030.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.399.074.850
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.324.644.150
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.243.300
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.611.400
Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	17.076.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.500.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	137.834.500
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	134.821.300
Monitoring evaluasi kinerja pegawai	3.013.200
Administrasi Umum Perangkat Daerah	523.361.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.310.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.444.300
Fasilitasi Kunjungan Tamu	117.815.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347.791.700
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.619.000
Pengadaan mebel	92.950.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	302.323.600
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	756.656.450
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.108.950
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	316.740.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	431.807.500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	938.472.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	196.470.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	97.862.500

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.770.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	615.370.000
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.538.896.300
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.162.865.900
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	336.958.400
Pelaksanaan Medical Check up DPRD	39.072.000
Layanan Administrasi DPRD	921.569.400
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	10.020.500
Fasilitasi Fraksi DPRD	5.036.000
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	18.512.900
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	888.000.000
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	12.783.955.100
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.852.902.200
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	22.661.000
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.830.241.200
Pembahasan Kebijakan Anggaran	689.680.200
Pembahasan KUA dan PPAS	23.005.300
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	17.995.000
Pembahasan APBD	225.236.000
Pembahasan APBD Perubahan	211.155.500
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	212.288,400
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3.436.401.700
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1.176.174.600
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	980.226.200
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.052.166.200
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	23.140.500
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	134.121.000
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	56.935.200
Pengawasan Penggunaan Anggaran	2.512.000
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	11.125.800
Peningkatan Kapasitas DPRD	2.698.497.000
Pendalaman Tugas DPRD	520.393.000
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	295.000.000
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	93.954.000
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.609.150.000
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	180.000.000
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.476.260.900
Kunjungan Kerja dalam Daerah	316.260.900
Pelaksanaan Reses	2.160.000.000
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	64.244.200
Pengawasan Kode Etik DPRD	64.244.200
Fasilitasi Tugas DPRD	1.565.968.900
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	185.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	219.005.100
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.161.343.800
TOTAL ANGGARAN	30.549.488.800

Sumber : DPAP Sekretariat DPRD Kab Kep Selayar Tahun 2025

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan PERMENPAN No. 53 tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja merupakan lembar dokumen

yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur, berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7

**Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2025**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB(75)
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Sesuai
2.	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan	Persentasi pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	100%
		Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD	80

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar Tahun 2025

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program	Anggaran
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	17.765.533.700,00
2.	Program dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	12.783.955.100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah merupakan proses pengumpulan data, analisis, dan / atau pelaporan informasi mengenai kinerja dari seorang individu atau organisasi. Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengetahui hasil / *outcome* yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi. Pengukuran kinerja pada Sekretariat DPRD didasarkan pada indikator dan target kinerja yang telah tertuang dalam rencana kinerja tahunan dan dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi berupa excel via grup *WhatsApp* dan website Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan Website Manca yang diatur oleh Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar.

Metode pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar :

1. Pengukuran Kinerja oleh Penanggung Jawab Sub Kegiatan/Kegiatan

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membagikan Form Pengukuran Kinerja ke masing-masing Penanggung jawab Sub Kegiatan/Kegiatan berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 melalui media komunikasi berbasis *online via whatsapp* dengan format excel yang hasil tiap bulannya dilaporkan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bentuk dokumen dan salinannya diserahkan kepada Sub Bagian Program dan Keuangan. Pengukuran Kinerja ini dilakukan secara berkala yaitu Bulanan / Triwulanan / dan Semester. Data Capaian Kinerja disusun berdasarkan hasil dari Form Pengukuran Kinerja oleh penanggung jawab masing-masing yang diserahkan kepada Sub Bagian Program dan Keuangan untuk diolah kembali dan beberapa dokumen pendukung pengukuran kinerja baik dari Inspektorat maupun Sekretariat DPRD sendiri. Pada data capaian kinerja tidak hanya melaporkan terkait kinerja program / kegiatan / sub kegiatan tetapi juga melaporkan pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tiap Bulan/Triwulan/Semester.

Berbeda dengan perhitungan pengukuran kinerja yang hanya merupakan hasil dari bulan tersebut, pada data capaian kinerja merupakan akumulasi dari bulan sebelumnya dan bulan tersebut. Contoh perhitungan :

Capaian Kinerja bulan Maret = R.Kinerja Januari+R. Kinerja Februari+R
Kinerja Maret

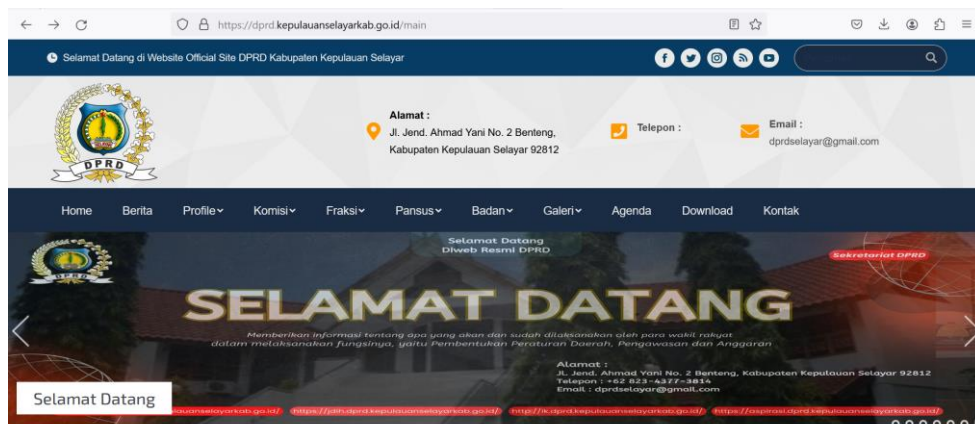
Data Capaian Kinerja ini kemudian menjadi bahan pada Evaluasi Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun Hasil Form Pengukuran Kinerja Bulanan /Triwulanan/Semesteran dan Data Capaian Kinerja Bulanan/Triwulanan/Semesteran (terlampir).

2. Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pengukuran Kinerja

a. Website Official Site DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD

Website Official Site DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar bertujuan untuk menyajikan informasi seputar DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, terkait profil Anggota DPRD Kab. Kepulauan Selayar dan agenda yang akan dan telah dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kab. Kepulauan Selayar dalam melaksanakan fungsinya, yaitu Pembentukan Peraturan Daerah, Pengawasan dan Anggaran. Adapun Website Official Site DPRD dapat diakses dengan link : <https://dprd.kepulauanselayarkab.go.id/main> .



Tidak hanya menyajikan informasi, Website Official Site DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar juga menyediakan link :

- Survei Kepuasan Layanan untuk mengukur indikator Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD. Survei ini dinilai oleh 25 Anggota DPRD terkait penilaian pelayanan yang telah diberikan oleh Sekretariat DPRD. Survei dapat diakses dengan link : <https://www.ik.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/>, E-survey ini telah mengacu kepada permenpan No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik



- Jaringan Dokumentasi Hukum, menyajikan informasi produk hukum yang telah dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun Jaringan Dokumentasi Hukum dapat diakses dengan link : <https://jdih.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/produk/jenis/keputusan-dprd>.

b. Manca (Monitoring Anggaran & Capaian Kinerja)

Aplikasi Manca adalah aplikasi berbasis online sebagai wadah penyajian realisasi anggaran, realisasi kinerja, renja, dan renstra dan data-data lain yang ada pada perangkat daerah dalam mendukung pembangunan daerah. Realisasi di input secara berkala per triwulan dan semester oleh masing-masing perangkat daerah, dan diatur oleh Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % \geq	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja dari Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan dengan

membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Penghitungan persentase capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

(1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi **})}{\text{Rencana **})} \times 100\%$$

B. Analisis Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

Penilaian terhadap capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dilandaskan pada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Dalam perjanjian kinerja berupa indikator kinerja dan target kinerja berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Analisis Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD beserta target dan capaian realisasinya dirinci pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2025			
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	<u>Indikator:</u> Nilai SAKIP Sekretariat DPRD <u>Meta Indikator:</u> Hasil Nilai SAKIP dari Inspektorat	Skala Nilai	BB (75)	(63,15)	84,2%	Belum mencapai target
	<u>Indikator:</u> Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah <u>Meta Indikator:</u> Hasil Penilaian Laporan Keuangan Oleh Inspektorat	Sesuai	Sesuai	Sesuai	100%	Sangat Tinggi
Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan	<u>Indikator:</u> Realisasi S.Kegiatan Program Kerja X100% Jumlah S.Kegiatan Program Kerja	%	100%	96,29%	96,29	Sangat Tinggi
	<u>Indikator:</u> Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD <u>Meta Indikator:</u> Hasil Survei oleh Anggota DPRD Kab. Kep. Selayar	Nilai	80	85,03	106,28%	Sangat Tinggi

Sumber : Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep Selayar Tahun 2025

Capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Perangkat Daerah

a. Indikator pertama yakni Nilai SAKIP Sekretariat DPRD dengan capaian indikator Nilai SAKIP Sekretariat DPRD untuk tahun 2025 berdasarkan Surat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar No. 700.1.2.7/058/III/EV-LAKIP/2025/ITDA tanggal 13 Maret 2025 memperoleh nilai B (63,15) dengan kategori **BAIK**. Namun pada tahun ini belum mencapai target yang telah ditetapkan, Adapun beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah :

1. Dokumen Perencanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik yaitu belum menuangkan hasil secara berkelanjutan dengan memperhatikan kinerja bagian lain.
2. Perencanaan kinerja belum dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil yang berkesinambungan
3. Pengukuran kinerja belum menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan berkesinambungan
4. Memanfaatkan perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
5. Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja; sehingga langkah aksi pelaksanaan pengukuran kinerja lebih optimal;
6. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja dengan menjadikan pengukuran kinerja sebagai kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;
7. Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
8. Menyusun dokumen laporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, menginformasikan keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan;
9. Memanfaatkan dokumen pelaporan kinerja dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
10. Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang diberikan.

- b. Indikator Kedua dengan indikator Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah untuk realisasi tahun. Berikut realisasi sasaran strategis 1 dengan dengan indicator Laporan keuangan yang sesuai SAP .

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Sasaran 1 tahun 2025

SASARAN 1					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meta Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Laporan Keuangan yang sesuai SAP	Hasil Penilaian Laporan Keuangan Oleh Inspektorat	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Sumber : Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep Selayar Tahun 2025

Data capaian ini dapat dilihat dari opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang dinilai oleh BPK.

Kinerja Sasaran 1 : didukung dengan pencapaian target pada Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota yang terdiri 10 kegiatan dari 39 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan baik ;

Berdasarkan laporan data capaian kinerja hingga bulan Desember 2025, realisasi capaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota adalah :

1. Indikator : Persentase Capaian Kinerja Sekretariat DPRD sebesar 94,04 %

Penjelasan : Dari 10 kegiatan pada program ini , terdapat 6 kegiatan yang mencapai realisasi 100 % yaitu ; kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Adnistrasi Keuangan Perangkat daerah , Admnistrasi barang milik daerah, Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, Pemeliharaan barang milik daerah, dan layanan admnistrasi DPRD. Sedang 4 (empat) kegiatan tidak mencapai target 100 % yaitu : kegiatan Admnistrasi kepegawaian perangkat Daerah (75,86 %) , Admnistrasi Umum Perangkat Daerah (68,35 %) , Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (93,48) dan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (61,00 %)

Faktor faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja out put dari beberapa kegiatan adalah , adanya beberapa sub kegiatan pada kegiatan tersebut yang dikurangi anggarannya bahkan di hapus akibat refocusing/efisiensi anggaran pada Sekretariat DPRD.

2. Indikator : Persentase capaian kinerja keuangan sebesar 97, 35 %

Penjelasan : Berdasarkan laporan realisasi fisik dan keuangan bulan Desember , realisasi serapan anggaran pada Sekretariat DPRD sebesar 97,35 % dapat dikategorikan cukup baik . hal ini di dukung oleh adanya perencanaan yang efektif, admnistrasi keuangan dan penatausahaan yang cukup baik serta komitmen dan kerjasama internal bagian yang cukup tinggi.

Nilai SAKIP SKPD Tahun 2025 dengan kategori baik B (63,15) dengan rekomendasi yang telah dijabarkan di atas, menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan upaya memenuhi rekomendasi yang tertuang dalam LHE SAKIP;
Laporan Keuangan yang sesuai SAP tahun 2025 telah sesuai SAP dan mencapai target.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP
Sekretariat DPRD Tahun Sebelumnya dan Periode Akhir Renstra

Indikator/Meta Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2025 terhadap target tahun 2026
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE		
2	3		4	5	6	7	
<u>Indikator:</u> Nilai SAKIP Sekretariat DPRD <u>Meta Indikator:</u> Hasil Nilai SAKIP dari Inspektorat	Skala Nilai	CC (58,50)	BB (75)	(63,15)	84,2% {(63,5/75)x100 %}	80	78,75 % {(63,15/80) x100%}
<u>Indikator:</u> Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah <u>Meta Indikator:</u> Hasil Penilaian Laporan Keuangan Oleh Inspektorat		Sesuai	Sesuai	Sesuai	100	sesuai	100

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

Analisis Ketercapaian Sasaran : Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah

a. Indikator : Nilai Sakip Sekretariat DPRD :

- 1) Belum tercapai Tercapai 100%, hanya mencapai 84,2 %
- 2) Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar yang hanya mendapat nilai CC (58,50) terdapat kenaikan sebesar 4,32 %
- 3) Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target tahun 2026 sebesar 78,93 %

b. Indikator : Laporan Keuangan sesuai SAP

- 1) Tercapai 100%,
- 2) Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target tahun 2026 sebesar 100 %

Berikut nilai realisasi dan capaian kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung kinerja sasaran Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah

Tabel 3.5
Realisasi dan Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan
Pendukung Sasaran 1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	100%	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5	5	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100%
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100%
Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan	26/bulan	26/bulan	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100%
Pegelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	12	100%
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	100%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	8	100%

Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	100%
Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	100%	75,86%	75,86%
Monitoring Evaluasi Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	4	4	100%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29	15	52%
Admnistrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100%	68,35%	68,35%
Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	20	100%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik	50	0	0%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40	40	100%
Fasilitas Krunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjunga2n Tamu	12	12	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	36	100%
Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Keterpenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%	93,48 %	93,48 %
Penagadaan kendaraan dinas jabatan	Jumah Unit kendaraan dinas	3	0	0
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	8	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35	35	100%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100%
Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang pemerintah daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	4	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	36	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	35	100%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	5	5	100%
Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	61,00%	61,00%
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 orang/bulan	25 Orang/bulan	83%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	125	125	100%
Pelaksanaan Medical Check Up	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check	25	0	0%

DPRD	Up DPRD			
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	12	12	100%
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	2	2	100%
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8	8	100%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12	12	100%

Sumber : Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep Selayar Tahun 2025

2. Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan

Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terdiri dari dua Indikator kinerja dengan tolak ukur capaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Sasaran 2

SASARAN 2					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meta Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	Realisasi S.Kegiatan Program Kerja Jumlah S.Kegiatan Program Kerja tepat waktu	100%	96,26	96,29 %
	Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD	Hasil survey Kualitas layanan Sekretariat DPRD oleh Anggota DPRD	80	85,03	106,6

Sumber : Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep Selayar Tahun 2025

Adapun yang menjadi penjelasan pada setiap indikator yang mendukung pencapaian sasaran strategis 2 adalah sebagai berikut:

a. Indikator 1 : Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD Tepat Waktu

Data Dukung Pelaksanaan Program Kerja DPRD Tepat Waktu

Sumber data diolah dari jumlah program kerja DPRD yang selesai. Yang dimaksud pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu adalah Pelaksanaan semua program kerja DPRD yang termuat dalam Renja DPRD dan telah diintegrasikan kedalam rencana kerja Sekretariat DPRD yaitu pada program

Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD, terfasilitasi dan terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, baik melalui Badan Musyawarah maupun yang ditetapkan oleh regulasi yang ada.

Dalam melaksanakan tiga fungsi DPRD yakni, fungsi Pembentukan Perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan, DPRD telah menyusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, dengan 3 program kerja yakni :

- a. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Program Pengembangan Regulasi Daerah;
- c. Program Peningkatan Kehumasan DPRD.

Ketiga program Kerja DPRD tersebut diatas terdiri dari kegiatan kegiatan berupa agenda DPRD yang selanjutnya diselaraskan / intergrasikan ke dalam dokumen perencanaan Sekretariat DPD dan terjabarkan melalui program kerja kerja Sekretariat DPRD yaitu pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD sesuai (permendagri 90 tentang tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah)

Formulasi pengukurannya adalah sebagai berikut :

$$R : \frac{\text{Realisasi S.Kegiatan Program Kerja}}{\text{Jumlah S.Kegiatan Program Kerja}} \times 100\%$$

$$R : \frac{26}{27} \times 100\%$$

R ; 96,29 %

Berikut data dukung indicator kinerja persentase program kerja DPRD tepat waktu berupa matriks pengintergrasian dan penyelarasan Program kerja DPRD ke dalam Program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar beserta jadwal dan tahapannya serta matrik realisasi pelaksanaan program kerja tersebut.

Tabel 3.7

**PENYELARASAN / PENGINTEGRASIAN PROGRAM KERJA DPRD
KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN SEKRETARIAT DPRD TA 2025**

No	Program Kerja DPRD			Program Kerja Sekretariat DPRD		Rencana Kerja /Target/ Tahapan pelaksanaan
1.	Program : Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Workshop, Seminar , Lokakarya Pelatihan	Program : dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD Sub.Kegiatan : - Pendalaman tugas DPRD	Januari s/d Desember (tentative sesuai permintaan)
		Kegiatan : Penyelenggaraan Tugas Fraksi-fraksi	- Rapat Fraksi, - Penyusunan Pandangan Umum dan Penyiapan Rekomendasi Fraksi	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Kegiatan : Layanan Administrasi DPRD Sub Kegiatan : Fasilitasi Fraksi DPRD	Januari s/d Desember (tentative sesuai permintaan)
				Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan : - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Januari s/d Desember (tentative sesuai permintaan)
		Kegiatan : Penyelenggaraan Kinerja Anggaran	- Rapat Kerja/Intern Pembahasan KUA PPAS Pokok dan perubahan, - Rapat Kerja/Intern Pembahasan APBD Pokok dan perubahan, - Rapat Koordinasi/ konsultasi - Harmonisasi pokok-	Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub kegiatan : - Pembahasan KUA PPAS - Pembahasan KUA PPAS Perubahan - Pembahasan APBD - Pembahasan APBD Perubahan	MingguII juli s/d Minggu II Agustus Minggu I s/d minggu II Agustus Minggu II September s/d 31 Desember Minggu II sept s/d 31 oktober

			<ul style="list-style-type: none"> - pokok pikiran DPRD Evaluasi APBD/APBD Perubahan 		<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD 	<p>Triwulan II</p> <p><i>(Permendagri No. 15 tahun 2024)</i></p>
		<p>Kegiatan : Penyelenggaraan Kinerja Pengawasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Kerja / Intern pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan perda dan pergub, pengawasan kebijakan dan pemerintahan daerah , dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sesuai bidang tugas dari komisi-komisi - Melakukan Kunjungan kerja/konsultasi terkait hasil rapat terhadap fungsi pengawasan tersebut 	<p>Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD</p>	<p>Kegiatan : Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Sub Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan hukum (Rapat Intern/Rapat Kerja dan kunjungan kerja) - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Insfrakstruktur (Rapat Intern/Rapat Kerja dan kunjungan kerja) - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Rapat Intern/Rapat Kerja dan kunjungan kerja) - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian(Rapat Intern/Rapat Kerja dan kunjungan kerja) - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam(Rapat Intern/Rapat Kerja dan kunjungan kerja) - Pengawasan Urusan Pemerintahan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK - Pengawasan Penggunaan Anggaran - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 	<p>Triwulan I – IV (tentative)</p> <p>Triwulan I – IV (tentative)</p> <p>Triwulan I – IV (tentative)</p> <p>Triwulan I – IV (tentative)</p> <p>Triwulan I – IV (tentative)</p> <p>Triwulan I – IV (tentative)</p> <p>Minggu IV Maret – III April <i>(LKPJ diserahkan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir)</i></p>

		Kegiatan : Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan Dewan (Pimpinan, Bamus, dan badan kehormatan)	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Komisi (Internal/Kerja) - Rapat Badan Musyawarah - Rapat Badan Kehormatan - Rapat koordinasi konsultasi DPRD - Kunjungan Kerja / koordinasi konsultasi 	Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD - Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah - Fasilitasi tugas Pimpinan DPRD Kegiatan : Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> -Pengawasan Kode Etik DPRD 	Triwulan I – triwulan IV (tentative sesuai permintaan)
2	Program Pengembangan Regulasi Daerah	Kegiatan : Penyelenggaraan Kinerja Legislasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan pembahasan draft produk hukum inisiatif, memfasilitasi bapemperda dalam membuat kajian kelayakan sebuah perda untuk dibahas - Penyusunan serta pengelolaan Program Pembentukan Perda. - Pembahasan Rancangan Perda dalam rapat-rapat, hearing dengan pakar, konsultasi 	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kegiatan : Peningkatan kapasitas DPRD Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 	Triwulan II (sebelum penetapan APBD (permndagri no. 80 tahun 2015 tentang pemebntukan produk hokum daerah Triwulan II dan III (tentative sesuai permintaan) Tentatif sesuai pembahasan ranperda

			dan kunjungan kerja sesuai dengan jadwal bamusy dan tata tertib			
3	Program Peningkatan Kehumasan DPRD	Kegiatan : Pemberitaan DPRD	- Menjalin Kemitraan dengan stakeholder, media elektronik maupun cetak untuk memberikan informasi yang seimbang kepada masyarakat tentang kinerja dan hasil kerja DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan: Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan - Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Januari s/d Desember
		Kegiatan : Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat	- Pelaksanaan reses - Kegiatan ini dilaksanakan melalui kunjungan ke daerah, identifikasi permasalahan ke Kecamatan, pertemuan/ /diskusi dengan Masyarakat terkait di penyampaian aspirasi masyarakat di gedung DPRD melalui kegiatan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan: Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sub Kegiatan - Pelaksanaan Reses - Kunjungan Kerja dalam daerah	Reses I : Jan s/d April Reses II : Mei s/d Agust Reses III : Sept s/d Des

			hearing dengar pendapat, penerimaan demonstrasi dan unjuk rasa.			
--	--	--	---	--	--	--

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 indikator 1

	Program Kerja DPRD	Program Kerja Sekretariat DPRD		Target pelaksanaan	Realisasi	Tkt Capaian	Sumber data
1.	Program : Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Program : dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD Sub.Kegiatan : - Orientasi DPRD/ Bimbingan Teknis DPRD/ Pendalaman Tugas DPRD	September 2024	18 s/d 23 September	Tepat waktu	Bag.umum dan Keu
		Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Kegiatan : Layanan Administrasi DPRD Sub Kegiatan : Fasilitasi Fraksi DPRD	Januari s/d Desember (tentative sesuai permintaan)	November-Desember	Tepat Waktu	Bag.umum dan Keu
		Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan : - Penyediaan Tenaga Ahli Fraki	Januari s/d Desember (tentative sesuai permintaan)	Januari s/d Desember	Tepat waktu	Bag.Persd.& Perundang-undangan
		Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub kegiatan : - Pembahasan KUA PPAS	Minggu II juli s/d Minggu II agustus <i>(Permendagri No. 15 tahun 2024)</i>	25 Agustus 2025 11 September 2025 22 September 2025 30 September 2025 1 Oktober 2025 21 21 Oktober 2025 3 November 2025 4 November 2025	Tidak Tepat waktu	Bag.Fasilitasi Pengawasan & Pengangara
		- Pembahasan KUA PPAS Perubahan		Minggu I s/d minggu II Agustus <i>(Permendagri No. 15 tahun 2024)</i>	6 Agustus 2025 7 Agustus 2025 8 Agustus 2025	Tepat waktu	

			- Pembahasan APBD	Minggu III September s/d 31 Des <i>(permendagri No. 15 tahun 2024)</i>	18 sd 20 November 2025 21 sd 22 November 2025 28 November 2025 (Penetapan APBD)	Tepat waktu	
			- Pembahasan APBD Perubahan	Paling lambat Minggu II Sept. Penetapan paling lambat 30 September <i>(permendagri No. 15 tahun 2024)</i>	6 Agustus 2025 7 Agustus 2025 8 Agustus 2025 26 Agustus (penetapan APBD perubahan)	Tepat waktu	
			- Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD	Paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir Minggu IV Juni <i>(Permendagri 77 tahun 2020)</i>	15 sd 17 April 2025 21 April 2025 22 April 2025 21 sd 23 April 2025 23 Juni 2025 25 Juni 2025 (Persetujuan bersama)	Tepat waktu	

		Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Sub Kegiatan - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan hukum (Rapat Intern/Rapat Kerja dan kunjungan kerja)	Triwulan I – IV (tentative)	Terlaksana sesuai permintaan	Tepat waktu Tepat waktu	Bag. Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran
			- Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Insfrakstruktur (Rapat Intern/Rapat Kerja dan kunjungan kerja)	Triwulan I – IV (tentative)	Terlaksana sesuai permintaan	Tepat waktu	
			- Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Rapat Intern/Rapat Kerja dan kunjungan kerja)	Triwulan I – IV (tentative)	Terlaksana sesuai permintaan	Tepat waktu	
			- Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Rapat Intern/Rapat Kerja dan kunjungan kerja)	Triwulan I – IV (tentative)	Terlaksana sesuai permintaan	Tepat waktu	
			- Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam - Pengawasan Urusan (Rapat Intern/Rapat Kerja dan kunjungan kerja)	Triwulan I – IV (tentative)	Terlaksana sesuai permintaan	Tepat waktu	
			- Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK (Rapat Intern/Rapat Kerja dan kunjungan kerja)	Triwulan I – IV (tentative)	Terlaksana sesuai permintaan	Tepat waktu	
			- Pengawasan Penggunaan Anggaran (Rapat Intern/Rapat Kerja dan kunjungan kerja)	Triwulan I – IV (tentative)	Terlaksana sesuai permintaan	Tepat waktu	
			- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Minggu IV Maret – III April	28 Maret – 22 April	Tepat waktu	

		Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD Sub Kegiatan : - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD - Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah	Triwulan I – IV (tentative) Triwulan I – IV (tentative)	Terlaksana sesuai permintaan 28 Maret 2024 10 Mei 2024 19 Juni 2024 17 September 2024 18 Oktober 2024 4 Nopember 2024 7 Nopember 2024 24 Desember 2024	Tepat waktu Tepat waktu	Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran
			- Fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	Triwulan I – IV (tentative)	Terlaksana sesuai permintaan	Tepat waktu	
			Kegiatan : Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD Sub Kegiatan : -Pengawasan Kode Etik DPRD	Triwulan I – IV (tentative)	Terlaksana sesuai permintaan	Tepat waktu	
2	Program Pengembangan Regulasi Daerah	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Sub Kegiatan : - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Juni-Desember sebelum penetapan APBD (permndagri no. 80)	21 April 2025 11 Agustus 2025	Tepat waktu	Bag. Persidangan dan perundang-undangan

				tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah	22 Desember 2025		
			- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Triwulan II dan IV (tentative)	30 Sept. 19 Des (pansus 1) 6 okt – 19 Des (pansus 2) 2 okt – 14 nov Pansus 3 27 april – 11 Juli RPJMD	Tepat waktu	
			Kegiatan : Peningkatan kapasitas DPRD Sub Kegiatan : - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tentatif sesuai pembahasan ranperda	Januari s/d Desember menyesuaikan dengan pembahasan perda	Tepat waktu	
3	Program Peningkatan Kehumasan DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan: Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan - Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Tepat waktu	Bag.Persd.& Perundang- undangan
		Program Dukungan Pelaksanaan	Kegiatan: Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				Bagian Fasilitasi Pengawasan

Dari perhitungan di atas, diperoleh penjelasan terhadap Indikator Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD Tepat Waktu sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh program kerja DPRD telah diintegrasikan ke dalam program kerja Sekretariat DPRD yaitu pada program Dukungan pelaksanaan tugas fungsi DPRD.
2. Realisasi kinerja pada indikator persentase program kerja DPRD tepat waktu sebesar 96,29 %, hal ini dapat kami jelaskan bahwa terdapat 1 sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu pada Kegiatan Pembahasan Anggaran, sub kegiatan Pembahasan KUA / PPAS . Pada sub kegiatan ini seharusnya dibahas pada minggu II Juli – minggu ke II Agustus . dan telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar dan DPRD paling lambat pada minggu kedua Agustus, namun berita acara Nota Kesepakatan ini ditandatangani pada tanggal 4 November 2025. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa penyesuaian anggaran yang harus dibahas secara rinci dan detail yang mengacu kepada prioritas pembangunan sehingga mengalami keterlambatan pada pembahasan, bukan karena kelalaian Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan tersebut.

Dan inilah yang merupakan salah satu tantangan besar bagi Sekretariat DPRD bagaimana kedepannya dapat memitigasi resiko tersebut.

Berdasarkan laporan data capaian kinerja hingga bulan Desember 2025, realisasi capaian kinerja pada program Dukungan pelaksanaan tugas fungsi DPRD yang terdiri dari 7 kegiatan dan 26 sub kegiatan kesemuanya terealisasi 100 %, Hal ini menunjukkan bahwa semua program kerja dan agenda agenda DPRD terlaksana dan terfasilitasi dengan baik.

3. Berdasarkan table tersebut diatas kami dapat jelaskan bahwa tingkat capaian kinerja untuk indikator kesatu (persentase program kerja DPRD tepat waktu) pada tahun ke empat periode renstra , mengalami penurunan . Namun Sekretariat DPRD akan terus meningkatkan kualitas layanan terhadap pelaksanaan tugas fungsi DPRD.
4. Berdasarkan data capaian kinerja Sebagian besar kegiatan DPRD dilaksanakan tepat waktu ini didukung oleh komitmen dan kerja sama Sekretariat DPRD, Anggota DPRD dan pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan Program Kerja DPRD;

b. Indikator 2 : Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD

Data Dukung Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD

Tabel 3.11
Penilaian Quisisioner Survey Tingkat Kualitas Layanan
Sekretariat DPRD

No	Pernyataan	Skala Penilaian Responden 25 Anggota Dewan				
		SP	P	KP	TP	STP
Dukungan Sumber Daya Manusia						
1	Disiplin Kerja(mengikuti peraturan, tepat waktu) kesediann bekerja di luar jam kerja	19	5	0	0	0
2	Inisiatif, komunikatif, dan kerjasama PNS dalam memberikan dukungan layanan dewan	5	19	0	0	0
3	Kmepetensi dan profesionalisme PNS dalam memeberikan dukungan layanan kepada Dewan	5	19	0	0	0
4	Kualitas, ketepatan, dan kecepatan menyiapkan dukungan administrasi persidangan (jadwal, undangan dan daftar hadir	5	19	0	0	0
5	Kualitas, ketepatan, dan kecepatan menyiapkan persidangan	7	17	0	0	0
Pelayanan Alat Kelengkapan						
6	Keramahan , kecepatan dan ketelitian petugas dalam merepon keluhan dilingkungan gedung DPRD	3	21	0	0	0
7	Penguasaan materi (peraturan terkait perjalanan dinas) dalam penyelesaian permasalahan dinas	5	19	0	0	0
8	Keramahan dan sikap akomodatif dalam pelayanan administrasi perjalanan	7	17	0	0	0
9	Kecepatan dan ketelitian dalam proses penanganan surat permohonan perjalanan dinas	5	19			
10	Kecepatan dan ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas	6	18	0	0	0
Pelayanan Kesehatan						
11	Komunikasi dan informasi mengenai adanya fasilitas kesehatan dewan	6	18	0	0	0
12	Komunikasi dan informasi hasil pelayanan kesehatan	2	22	0	0	0
Penyediaan Sarana dan Prasarana						
13	Kualitas ruang rapat paripurna dan ruang AKD	2	22	0	0	0
14	Kualitas sarana pendukung (toilet, taman, lift, dan alat pendingin)	4	20	0	0	0
15	Kualitas ruang kerja anggota	3	21	0	0	0
Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan						
16	Fasilitas pengaduan masyarakat kepada anggota DPRD	5	19	0	0	0
17	Publikasi kegiatan DPRD kepada masyarakat	8	16	0	0	0
18	Fasilitasi tamu-tamu DPRD	1	23	0	0	0
Pelayanan Persidangan dan Risalah						
19	Fasilitasi kegiatan hearing dan reses	10	14	0	0	0
20	Fasilitasi bahan kegiatan rapat paripurna, rapat paripurna istimewa dan koordinasi pelantikan anggota DPRD	7	17	0	0	0
21	Fasilitasi Penyediaan akomodasi (jamuan, tempat, sound system) kegiatan rapat DPRD	4	20	4	0	0

Pelayanan Bagian Perundang-Undangan dan Pengkajian						
22	Fasilitasi bahan rancangan penyusunan naskah akademik dan ranperda prakarda DPRD	1	23	0	0	0
23	Fasilitasi penyediaan tenaga ahli dan staf ahli fraksi DPRD	3	21	0	0	0
Pelayanan Bagian Keuangan						
24	Ketepatan waktu penyampaian gaji dan tunjangan DPRD	18	6	0	0	0
25	Komunikasi dan informasi mengenai hak-hak DPRD	10	14	0	0	0
26	Penyusunan/perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan DPRD	6	18	0	0	0
Jumlah Skala Penilaian 25 Anggota Dewan atas 27 Pernyataan		157	467	0	0	0

Sumber : <http://www.ik.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/>, diakses pada Januari 2025

Keterangan :

- SP : Sangat Puas
- P : Puas
- KP : Kurang Puas
- TP : Tidak Puas
- STP : Sangat Tidak Puas
- Skor Nilai SP : 5
- Skor Nilai P : 4
- Skor Nilai KP : 3
- Skor Nilai TP : 2
- Skor Nilai STP : 1
- **24 Anggota Dewan x 26 Pernyataan : 624 Jawaban**

Tabel 3.12

**Perhitungan Penilaian Quisisioner Survey Tingkat Kualitas Layanan
Sekretariat DPRD**

Penilaian	Jumlah Skala Penilaian 25 Anggota Dewan atas 27 Pernyataan	Skor	Total Skor
1	2	3	4 = 2x3
Sangat Puas	157	5	785
Puas	467	4	1868
Kurang Puas	0	0	0
Tidak Puas	0	0	0
Sangat Tidak Puas	0	0	0
Total	624		2653

Sumber : <http://www.ik.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/>, diakses pada Januari 2025

Keterangan

- Y : Skor Tertinggi x Jumlah Skala Penilaian 25 Anggota Dewan atas 26 Pernyataan
- Y : 5 x 624 = 3.120

Rumus Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD

$$: \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100$$

Y

$$: \frac{2.653}{3.120} \times 100$$

3.120

$$: 85,03$$

Dari perhitungan dan penjelasan diatas, diperoleh analisis terhadap Indikator 2 yakni Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat sebagai berikut.

- Realisasi dan Capaian indikator Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD diperoleh nilai 85,03 dengan persentase capaian dari target adalah 106,28 % yang diperoleh dari hasil survey yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD melalui website <https://www.ik.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/> yang dapat diakses oleh 24 Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Responden Survey Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD adalah 24 orang Anggota DPRD Kab. Kep Selayar atas 26 pernyataan sehingga diperoleh total 6 jawaban bervariasi dengan skala penilaian Sangat Puas dengan skor 5, Puas dengan Skor 4, Kurang Puas dengan skor 3, Tidak Puas dengan skor 2, dan Sangat Tidak Puas dengan skor 1. Dari Tabel 3.10 diatas diperoleh angka bahwa dari 25 Anggota DPRD Kab Kep. Selayar dengan 26 pernyataan diperoleh 624 jawaban dengan penilaian yakni 157 jawaban Sangat Puas, 467 Jawaban Puas, 0 Jawaban Kurang Puas dan 0 jawaban Tidak Puas. Berdasarkan table tersebut diatas kami dapat jelaskan bahwa tingkat capaian kinerja untuk indicator kedua (tingkat kualitas layanan sekretarit DPRD) selalu melebihi target setiap tahunnya, di tahun 2025, terdapat 5 pernyataan yang masih mendapat nilai “kurang puas” namun di tahun ini semua pernyataan ada di nilai “puas” dan “sangat puas”

Tabel 3.13

Perbandingan Target dan Realisasi sampai pada akhir periode renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meta Indikator	2024	2025			Capaian tahun 2025 terhadap target tahun 2026
				Target	Realisasi	Tingkat capaian	
Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	$\frac{\text{Realisasi S.Kegiatan Program Kerja}}{\text{Jumlah S.Kegiatan Program Kerja}} \times 100\%$	100	100	96,29	96,29 %	96,29 %
	Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD	Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD	88	80	85,03	106,6 %	99,64 %

Sumber : Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab Kepulauan Selayar 2025

Berdasarkan table tersebut diatas kami dapat jelaskan bahwa tingkat capaian kinerja untuk indicator kedua (tingkat kualitas layanan sekretarit DPRD) pada tahun ke empat periode renstra , telah melebihi target kinerja, Namun Sekretriari DPRD akan terus meningkatkan kualitas layanan terhadap pelaksanaan tugas fungsi DPRD.

Analisis Ketercapaian Sasaran : Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Indikator : Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu,
 - 2) Realisasi kinerja sebesar 96,29 %, dengan demikian tidak tercapai sesuai target 100%,
 - 3) Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap tahun 2026 sebesar 96,29 %
 - 4) Dibandingkan Realisasi tahun sebelumnya terdapat penurunan sebesar 3,71 %
- b) Indikator : Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD
 - 1) Realisasi kinerja sebesar 106,6 % , dengan demikian persentase capaian terhadap target sebesar 100 % (terlampaui)
 - 2) Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap tahun 2026 sebesar 100,35
 - 3) Dibandingkan Realisasi tahun sebelumnya terdapat penurunan sebesar 3,06 %

C. Realisasi Keuangan

Tabel 3.14
Capaian Realisasi Anggaran Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	17.765.533.700	17.092.757.686	672.776.014	96%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.395.100	142.097.200	2.297.900	98%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	91.280.200	90.514.200	766.000	99%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.480.000	7.247.000	233.000	97%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.574.900	5.435.000	139.900	97%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.030.000	3.707.000	323.000	92%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.030.000	3.734.000	296.000	93%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.000.000	16.713.000	287.000	98%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14.747.000	253.000	98%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.399.074.850	2.144.317.157	254.757.693	89%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.324.644.150	2.072.432.857	252.211.293	89%

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.243.300	17.928.000	315.300	98%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18.000.000	17.806.000	194.000	99%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.611.400	7.258.300	353.100	95%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	17.076.000	15.603.000	1.473.000	91%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.500.000	13.289.000	211.000	98%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	9.748.600	251.400	97%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.000.000	2.975.000	25.000	99%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	1.821.000	179.000	91%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	4.952.600	47.400	99%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	137.834.500	132.370.631	5.463.869	96%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.013.200	2.948.000	65.200	98%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	134.821.300	129.422.631	5.398.669	96%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	523.361.000	522.354.290	1.006.710	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.310.000	15.254.000	56.000	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	42.444.300	42.081.000	363.300	99%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	117.815.000	117.517.000	298.000	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347.791.700	347.502.290	289.410	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	395.273.600	368.679.999	26.593.601	93%
Pengadaan Mebel	92.950.000	85.800.000	7.150.000	92%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	302.323.600	282.879.999	19.443.601	94%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	756.656.450	721.365.413	35.291.037	95%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.108.950	8.098.000	10.950	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	316.740.000	289.288.613	27.451.387	91%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	431.807.500	423.978.800	7.828.700	98%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	938.472.500	933.630.882	4.841.618	99%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	196.470.000	193.683.370	2.786.630	99%

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97.862.500	95.975.612	1.886.888	98%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.770.000	28.730.900	39.100	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	615.370.000	615.241.000	129.000	100%
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.538.896.300	11.265.246.014	273.650.286	98%
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.162.865.900	10.892.381.064	270.484.836	98%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	336.958.400	334.042.950	2.915.450	99%
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	39.072.000	38.822.000	250.000	99%
Layanan Administrasi DPRD	921.569.400	852.947.500	68.621.900	93%
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	10.020.500	10.020.000	500	100%
Fasilitasi Fraksi DPRD	5.036.000	-	5.036.000	0%
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	18.512.900	18.463.000	49.900	100%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	888.000.000	824.464.500	63.535.500	93%
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.783.955.100	12.648.627.857	135.327.243	99%
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.852.902.200	1.850.977.200	1.925.000	100%
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	22.661.000	21.293.400	1.367.600	94%
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.830.241.200	1.829.683.800	557.400	100%
Pembahasan Kebijakan Anggaran	689.680.200	676.552.600	13.127.600	98%
Pembahasan KUA dan PPAS	23.005.300	23.005.300	-	100%
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	17.995.000	17.943.200	51.800	100%
Pembahasan APBD	225.236.000	216.131.900	9.104.100	96%
Pembahasan APBD Perubahan	211.155.500	207.359.600	3.795.900	98%
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	212.288.400	212.112.600	175.800	100%
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3.436.401.700	3.414.225.523	22.176.177	99%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.176.174.600	1.170.956.801	5.217.799	100%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	980.226.200	966.966.100	13.260.100	99%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.052.166.200	1.051.646.762	519.438	100%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	23.140.500	21.605.700	1.534.800	93%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	134.121.000	133.395.760	725.240	99%

Sumber Daya Alam				
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	56.935.200	56.016.400	918.800	98%
Pengawasan Penggunaan Anggaran	2.512.200	2.512.200	-	100%
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	11.125.800	11.125.800	-	100%
Peningkatan Kapasitas DPRD	2.698.497.000	2.605.241.850	93.255.150	97%
Pendalaman Tugas DPRD	520.393.000	516.085.320	4.307.680	99%
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	93.954.000	93.605.030	348.970	100%
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	180.000.000	162.000.000	18.000.000	90%
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.609.150.000	1.538.551.500	70.598.500	96%
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	295.000.000	295.000.000	-	100%
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.476.260.900	2.475.036.600	1.224.300	100%
Kunjungan Kerja dalam Daerah	316.260.900	315.036.600	1.224.300	100%
Pelaksanaan Reses	2.160.000.000	2.160.000.000	-	100%
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	64.224.200	62.584.200	1.640.000	97%
Pengawasan Kode Etik DPRD	64.224.200	62.584.200	1.640.000	97%
Fasilitasi Tugas DPRD	1.565.988.900	1.564.009.884	1.979.016	100%
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	185.640.000	185.635.000	5.000	100%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	219.005.100	218.366.572	638.528	100%
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.161.343.800	1.160.008.312	1.335.488	100%
TOTAL ANGGARAN	30.549.488.800	29.741.385.543	808.103.257	97,35%

Sumber : RFK Desember 2025

Realisasi anggaran T.A. 2025 cukup tinggi yakni 97,35% dengan perolehan realisasi sub kegiatan masing-masing rata-rata mencapai 99% dengan kinerja 100%

BAB IV

PENUTUP

Hasil laporan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar tahun 2024 memiliki 2 sasaran strategis yaitu:
 - a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah dengan dua Indikator yakni indikator nilai SAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2025 yakni predikat B (61,15) dengan rekomendasi yang telah dijabarkan di atas, menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan upaya memenuhi rekomendasi yang tertuang dalam LHE SAKIP, indikator kedua yakni Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah telah sesuai SAP dan mencapai target;
 - b. Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dengan dua indikator yakni Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu memperoleh realisasi 96,29 %, belum mencapai yang telah ditetapkan T.A. 2025. Indikator Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD terhadap layanan Sekretariat telah memenuhi target dengan nilai 85,03 dengan persentase capaian 106,6 % dengan kategori sangat tinggi,
2. Realisasi anggaran sebesar Rp 29.741.385.543,00 atau sebesar 97,35 % dari target sebesar Rp 30.549.488.800,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp 808.103.257,00 atau 2,65 %.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

- a. Intensif dalam melakukan penyesuaian terhadap peraturan terbaru terkait pelayanan kepada Anggota DPRD dan menjalin komunikasi yang baik dengan Anggota DPRD;
- b. Penyediaan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan formasi bidang tugas yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap DPRD;
- c. Penyediaan anggaran yang memadai secara bertahap untuk dapat mengakomodir masukan Anggota DPRD dari Survey Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD dan LHE SAKIP.

Tabel 3.10
Jumlah Produk Hukum DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2019-2024

Sub Elemen	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
	2021	2022	2023	2024	2025
Peraturan Daerah	6	10	11	11	8
Peraturan Daerah Istimewa	0	0	0	0	0
Peraturan DPRD	0	0	1	0	0
Keputusan DPRD	12	16	15	12	8
Keputusan Pimpinan DPRD	5	5	5	5	7
Rancangan Perda yang Disetujui DPRD	6	10	11	11	8
Rancangan Perda yang Diusulkan DPRD	6	10	11	11	8

5. Program Pengembangan Regulasi Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Legislasi TA 2025 berupa 8 Peraturan Daerah yang telah ditetapkan TA 2025, 8 Keputusan DPRD, 7 Keputusan Pimpinan DPRD, 8 Propemperda, 8 Ranperda yang disetujui DPRD.